

IMPLEMENTASI PROGRAM SAFETY RIDING UNTUK KALANGAN PELAJAR OLEH POLRES KAMPAR

Oleh:

Dewi Pela Wulandari

dewipela@gmail.com

Pembimbing: H. Zulkarnaini, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Transportation is one tool that is needed in human life, one of them is a motorcycle. The increasing use of motorcycles has an impact on the use of highways that are also increasing. Whereas the area of Kampar district is large enough to cause congestion and traffic density problems are growing that causing traffic violations by the society, especially for students. To overcome traffic problems the Police introduce a Program that known as Safety Riding Program (safety driving). This research used type qualitative method with descriptive data assessment. In collecting data, researcher use purposive sampling method as source of information and data analysis with triangulation technique.

The results showed that the implementation of safety riding program for the students by Kampar Country Police in the implementation has been running smoothly, while in terms of resources are insufficient, including from human resources that still classified less and from physical resources ie tools used in the implementation the safety riding program is still inadequate and lack of information delivery. Then executive officers whom still lack as obstacles in the implementation of safety riding program should be overcome by adding staff or executive staff. As for the students should have a high awareness of orderly passage and make safety a necessity in driving.

Keywords: Policy, Implementation, Safety Riding, Student

Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu alat yang paling dibutuhkan dalam kehidupan, salah satunya seperti sepeda motor. Penggunaan sepeda motor yang meningkat tersebut berdampak juga pada penggunaan jalan raya yang juga meningkat. Menurut **Adisasmita (2011 : 68)** meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat telah mengakibatkan berbagai kesulitan seperti kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat.

Dengan jumlah penduduk kabupaten Kampar yang tergolong padat dan penambahan kendaraan yang meningkat serta tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga hal ini akan menambah kemacetan dan kepadatan lalu lintas yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran masyarakat dalam berkendara di jalan raya.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lalu lintas di jalan raya maka pemerintah melalui pihak kepolisian melaksanakan suatu program yang dikenal dengan Program *Safety Riding (keselamatan berkendara)*. Program *safety riding* pertama kali dilaksanakan di Indonesia diawali oleh Kota Surabaya sebagai percontohan. Program *safety riding* merupakan program nasional yang berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bagian XI tentang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan pada pasal 203 ayat (1) berbunyi “pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan”. Untuk menjamin keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan rencana umum nasional keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun yang dimaksud dengan

program nasional Kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah :

- a. Polisi Mitra Kampus (*Police Goes to Campus*)
- b. Cara Berkendara dengan Selamat (*Safety Riding*)
- c. Forum Lalu Lintas (*Traffic Board*)
- d. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas
- e. Taman Lalu Lintas
- f. Sekolah Mengemudi
- g. Kemitraan Global Keselamatan Lalu Lintas (*Global Road Safety Partnership*).

Permasalahan-permasalahan yang berupa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tidak hanya dijumpai pada orang dewasa saja, namun pelajar di Kabupaten kampar juga turut andil dalam pelanggaran yang sering dijumpai di jalan raya, dilihat dari daftar tabel pelanggaran-pelanggaran pada pelajar :

Tabel Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Dan Jumlah Pelaku Kecelakaan Pada Pelajar di Kab.Kampar

NO	Tahun	Pelanggaran	Pelaku Kecelakaan	Jumlah
1	2014	4294	43	4337
2	2015	3308	11	3319
3	2016	2444	12	2445

Sumber: Sat lantas Kabupaten Kampar(2016)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pada tahun 2014 pelanggaran lalu lintas pada tingkat pelajar masih dengan jumlah 4294. Sedangkan pada tahun 2015 tercatat pelanggaran lalu lintas kembali terus naik pada tingkat pelajar dengan jumlah 3308. Dan ditutup dengan tahun 2016 menurun dengan jumlah tingkat pelajar sebanyak 2444. Dapat disimpulkan

pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di tingkat pelajar dari tahun ke tahun masih berada pada angka yang tinggi.

Tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, pihak kepolisian dan sekolah. Alasan orang tua memberikan kendaraan pada anaknya serta membolehkan mengendarai ke sekolah adalah hal yang seharusnya tidak benar dilakukan.

Pelaksanaan program *safety riding* di Kabupaten Kampar masih mengalami berbagai hambatan. Dalam pelaksanaan program *safety riding* mengalami kendala dikarenakan fasilitas yang terbatas, seperti penyediaan alat misalnya helm, sepeda motor, dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan survei yang dilakukan peneliti melihat bahwa masyarakat khususnya pelajar beranggapan bahwa menganggap tertib berlalu lintas tidak menjadi kewajiban dalam berkendara.

Selain itu kurangnya pengawasan dan sikap orang tua yang mau saja memberikan sepeda motor kepada anak yang belum mendapatkan surat izin mengemudi adalah hal yang tidak benar karena mengingat mereka masih bersatus pelajar atau remaja.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Safety Riding Untuk Kalangan Pelajar Oleh Polres Kampar
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Implementasi Program Safety Riding Untuk Kalangan Pelajar Oleh Polres Kampar

Konsep Teori

1. Kebijakan

Menurut **Parker** dalam **Kusumanegara (2010 : 4)** kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis. Sedangkan kebijakan menurut **Graycar dalam keban (2008:59)** dapat dipandang dalam perspektif filosofis, produk, proses dan kerangka. Sedangkan menurut **Eyeston** mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh **Dye** yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau dan tidak dilakukan (**Winarno, 2014 : 20**).

2. Implementasi

Menurut **Gardon dan Pasolong** dalam **Mulyadi (2015 : 24)** implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Implementasi merupakan suatu tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.

Selanjutnya **Edwards III** dalam **Mulyadi (2015 : 48)** yang mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok yakni (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakandan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi yakni :

- 1) Komunikasi
- 2) Sumberdaya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur birokrasi

3. Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas adalah perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Lalu lintas merupakan kegiatan kendaraan baik itu bermotor maupun menggunakan mobil, bus dan sebagainya dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

4. Safety Riding

Safety riding adalah cara berkendara yang ideal yang harus memiliki tingkat keamanan dan keselamatan berkendara bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Artinya *safety riding* adalah cara berkendara yang aman dan nyaman bagi si pengendara maupun bagi orang lain.

Menurut **Dian Afrilla** dalam **Dine Wahyu Prima (2015 : 372)** *safety riding* merupakan upaya berkendara dimana lebih memperhatikan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lain yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan dan akibat dari kecelakaan lalu lintas.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar, dengan lokus penelitiannya yaitu Sat Lantas Kabupaten Kampar dan Sekolah di Kabupaten Kampar

3. Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan *informan* yang dipilih berdasarkan ciri-ciri dan kriteria-kriteria khusus yang sesuai, artinya subjek tersebut memahami dan menguasai permasalahan dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun informan penelitian ini adalah :

1. Kepala Unit Dikyasa
2. Kepala Sekolah
3. Pelajar
4. Pihak yang berkoordinasi yaitu RSDC

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari obyek penelitian atau *informan* penelitian yaitu berupa hasil wawancara yang mendalam dan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber kedua atau secara tidak langsung melalui berbagai literatur baik dari buku, media massa (cetak atau elektronik), dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan menggunakan indera penglihatan terhadap objek penelitian

yaitu Sat Lantas Polres Kampar, sekolah dan pelajar

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (**Mulyana, 2004 : 180**). Wawancara ini dilakukan peneliti dengan para informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi/data tentang Implementasi Program *Safety Riding* Untuk Kalangan Pelajar Oleh Polres Kampar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan dari dokumen yang ada di lokasi penelitian berupa arsip, foto-foto atau gambar informan dan aktivitasnya yang berguna untuk memperkuat data primer yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu pengolahan data atau informasi yang diperoleh dilapangan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan. Semua hasil data tersebut dikumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai kegiatan *chek, recheck dan crosscheck* melalui persepsi peneliti untuk dijadikan sebagai suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Safety Riding Untuk Kalangan Pelajar Oleh Polres Kampar

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Dalam pengertian yang luas implementasi merupakan tahap dari proses kebijakan publik segera setelah penetapan undang-undang. Artinya implementasi adalah tahap dimana pelaksanaan dari sebuah undang-undang yang melibatkan didalamnya berbagai aktor, program, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan publik

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang implementasi program *safety riding* untuk kalangan pelajar oleh Polres Kampar yang berfokus pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, menurut teori yang dikemukakan oleh George Edward III, yang mengatakan dalam pandangannya Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian informasi, pesan, antara individu dengan individu maupun antara kelompok dengan kelompok. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi suatu kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pelaksana atau aktor kebijakan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Oleh karena itu komunikasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena apabila peraturan implementasi jika ditransmisikan dengan baik maka implementasi suatu kebijakan akan berjalan dengan lancar. Hal ini juga

tejadi dalam Pelaksanaan Program Safety Riding Untuk Kalangan Pelajar Oleh Polres Kampar dengan Pelajar dengan menciptakan komunikasi yang baik agar tujuan dari Program Safety Riding tersebut dapat dimengerti oleh kelompok sasaran.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari haril wawancara dengan Kepala Unit Dikyasa berikut :

“Program safety riding yang dilakukan kami berkoordinasi dahulu dengan pihak sekolah yang dalam hal ini pihak sekolah yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan program safety riding dimana kita mengirimkan surat terlebih dahulu dan selanjutnya pelajar akan kita berikan edukasi seperti pelatihan atau pendidikan keterampilan bagaimana cara berkendara yang cermat dan aman sehingga tidak merugikan pengguna jalan. Setelah mengetahui teori, pelajar akan diajarkan praktek dari safety riding tersebut”. (wawancara dengan kepala bagian Unit Dikyasa satlantas Polres Kampar, 20 Oktober 2017)

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyampaian kebijakan program safety riding untuk kalangan pelajar dalam hal ini sebagai pelaksana Satlantas Polres Kampar sudah berjalan dengan baik, komunikasi yang disampaikan dengan sekolah sebagai pihak yang berkoordinasi yaitu dengan mengirimkan surat pemberitahuan atau izin untuk melaksanakan program safety riding. Selanjutnya informasi yang disampaikan Satlantas Polres Kampar disampaikan langsung kepada kelompok sasaran program yaitu pelajar. Pihak Satuan Lalu Lintas tahu apa yang mereka laksanakan setelah suatu perintah dikeluarkan untuk dilaksanakan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

Jika peintah-perintah implementasi mungkin sudah diteruskan secara cermat, jelas, konsiten, tapi apabila para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi kebijakan akan cenderung tidak efektif. Dalam hal sumberdaya dalam pelaksanaan safety riding masih terkendala pada staf, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara berikut :

Staf atau pihak yang bertugas dalam pelaksanaan program safety riding merupakan anggota kepolisian yang sudah ada memiliki sertifikat pelatihan mengemudi dari polda riau. Staf tersebut terdiri dari anggota dikyasa dengan jumlah personil sebanyak 2 atau 3 orang. Dan jika kita mengalami kekurangan jumlah personil atau membutuhkan personil tambahan maka kita akan meminta anggota unit laka lantas dan unit regident untuk membantu dalam pelaksanaan program safety riding.” (wawancara dengan kepala bagian Unit Dikyasa satlantas Polres Kampar, 20 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa staf atau pihak yang bertugas dalam hal ini adalah unit Dikyasa Sat Lantas Polres Kampar dalam jumlah personilnya masih sangat terbatas, karena dalam pelaksanaannya bila ada kekurangan jumlah personil maka pihak unit laka lantas dan unit regidentlah yang akan memebantu pelaksanaan program safety riding. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program safety riding oleh Sat Lantas Polres Kampar.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pelajar sebagai sasaran program safety riding :

”Dalam pelaksanaan program safety riding yang diadakan di sekolah kami merasa jumlah personil atau dari kepolisiannya masih kurang atau terbatas, dengan jumlah 2 hingga 3

personil yang bertugas kami pelajar tidak seluruhnya merasakan praktek dari penjelasan materi yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian sebelumnya mengenai safety riding” (wawancara dengan pelajar SMKN 1 Bangkinang Kota, 23 Oktober 2017).

Hasil wawancara diatas juga menjelaskan bahwa jumlah personil atau pihak yang bertugas dalam pelaksanaan program safety riding dalam hal ini adalah pihak Sat Lantas Polres Kampar masih terbatas, dilihat dari apa yang dirasakan oleh pelajar sebagai sasaran penerima program safety riding. Apabila dibandingkan dengan kelompok sasaran program yang mengikuti program safety riding dengan jumlah personel yang bertugas tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan, karena ketersediaan pelaksana atau implementor kurang memadai dari segi jumlah sehingga dapat berpengaruh pada keberhasilan implementasi program safety riding untuk kalangan pelajar oleh polres Kampar.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin berjalan efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan penelitian dilapangan, sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah Satuan Lalu Lintas Polres Kampar, selaku pelaksana program safety riding selalu mendukung program safety riding dan siap melaksanakannya dan sangat bermotivasi untuk tercapainya tertib berlalu lintas di jalan raya.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian sebagai berikut :

“Kami unit dikyasa bagian dari kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Kampar sebagai pelaksana program ini mendukung sepenuhnya agar terciptanya tertib berlalu lintas serta menekan jumlah pelanggaran lalu lintas dan siap melaksanakannya dan sangat bermotivasi agar tercapainya Trust Building (membangun kepercayaan) dan Partnership building (membangun kebersamaan) masyarakat luas terhadap Polri dalam masalah lalu lintas”. (wawancara dengan kepala bagian Unit Dikyasa satlantas Polres Kampar, 20 Oktober 2017)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa sikap pelaksana kebijakan program safety riding dalam hal ini adalah Satuan Lalu Lintas Polres mendukung dan siap melaksanakan program safety riding agar terciptanya tertib berlalu lintas di jalan raya serta menekan jumlah pelanggaran lalu lintas agar jumlah pelanggaran-pelanggaran lalu lintas menurun, serta sangat bermotivasi untuk tercapainya kepercayaan dan kebersamaan masyarakat terhadap Polri dalam masalah lalu lintas, agar menciptakan masyarakat yang tertib berlalu lintas di jalan raya. Artinya Satuan Lalu Lintas mendukung sepenuhnya pelaksanaan program safety riding agar terciptanya kepercayaan bagi masyarakat atau pelajar terhadap Polri dalam masalah lalu lintas.

Selanjutnya terkait insentif khusus, tidak ada anggaran khusus dalam pelaksanaan safety riding, sebagaimana hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut :

“Terkait dengan insentif khusus dalam pelaksanaan program safety riding kami sebagai pihak yang

bertanggung jawab tidak ada insentif khusus. Memang kami melaksanakan program safety riding agar terciptanya tertib berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas agar dapat menurun". (wawancara dengan Kepala Unit Dikyasa, 6 Desember 2017)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan safety riding khususnya pada kalangan pelajar oleh Satuan lalu Lintas Polres Kampar tidak ada anggaran khusus yang mengatur, kegiatan safety riding dilaksanakan karena sudah menjadi program prioritas Satuan Lalu Lintas Polres Kampar dibidang keamanan dan keselamatan sehingga tidak dipungut biaya apa pun bagi penerima program dalam hal ini adalah pelajar tersebut. Sedangkan terkait dengan insentif yang diberikan atau diterima oleh Para Pelaksana program safety riding yaitu satuan lalu lintas, semenjak dilaksanakannya program safety riding mereka tidak ada menerima atau mendapat insentif khusus. Mereka semata-mata melaksanakan program safety riding berdedikasi agar terciptanya masyarakat yang tertib berlalu lintas dan menekan menurunnya angka pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kecelakaan.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan suatu kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan

cara melakukan koordinasi dengan baik. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Terdapat dua indikator dalam variabel struktur birokrasi yaitu SOP dan Fragmentasi. Dalam pelaksanaan Safety riding untuk kalangan pelajar oleh Polres Kampar, belum ada SOP khusus yang mengaturnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut :

"Sampai saat ini dalam pelaksanaan program safety riding memang belum ada Standard Operating Procedures (SOP) secara khususnya. Kami pihak unit dikyasa sebagai pelaksana program safety riding hanya berpedoman kepada job description atau tugas dan fungsi sebagai unit Dikyasa, yang salah satunya adalah bertugas melaksanakan program kegiatan pendidikan dan penerangan masyarakat tentang lalu lintas dimana salah satu program tersebut adalah safety riding" (wawancara dengan kepala bagian Unit Dikyasa satlantas Polres Kampar, 20 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, Unit Dikyasa sebagai kepolisian satuan lalu lintas Polres Kampar sebagai pelaksana program safety riding belum memiliki *Standard Operating Procedures (SOP)* secara khusus, namun pihak unit dikyasa sebagai pelaksana dalam pelaksanaan program safety riding berpedoman pada Job description atau tugas dan fungsi Unit Dikyasa dalam melaksanakan program safety riding. Salah satunya adalah melakukan atau melaksanakan program pendidikan atau penerangan kepada masyarakat tentang lalu lintas yang program tersebut salah satu diantaranya adalah program safety riding. Sedangkan untuk koordinasi dalam pelaksanaan safety riding sudah berjalan

dengan lancar terlihat dari kerjasama dengan pihak RSDC, hal ini sesuai dengan wawancara berikut :

“Pelaksanaan program safety riding kami juga berkoordinasi atau bekerjasama dengan tim Riau Safety Driving Centre Polda Riau. Kami berkoordinasi dengan RSDC karena tim RSDC adalah tim atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang di kelola dibawah naungan Polda Riau yang memiliki fungsi dan tugas dalam memberikan pelatihan dan pendidikan keselamatan berkendara (safety riding) untuk semua jenis kendaraan”. (wawancara dengan kepala bagian Unit Dikyasa satlantas Polres Kampar, 20 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pihak Satuan lalu Lintas sebagai pelaksana program safety riding berkoordinasi atau bekerjasama dengan tim *Riau Safety Driving Centre (RSDC)* yang merupakan salah satu sekolah keselamatan lalu lintas di Indonesia. Pihak Satlantas Polres Kampar sudah tepat melakukan koordinasi dengan baik dilihat dari kerjasama antara RSDC yang memang merupakan pihak atau perusahaan jasa yang bergerak dalam emberikan pelatihan bagaimana cara berkendara dengan selamat serta memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pendidikan tentang keselamatan berkendara.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Safety Riding Untuk Kalangan Pelajar Oleh Polres Kampar

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Program Safety Riding Untuk Kalangan Pelajar Oleh Polres Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Tenaga Pelaksana

Dalam Implementasi Program Safety Riding Untuk Kalangan Pelajar Oleh Polres Kampar yang menjadi salah satu hambatan adalah ketersediaan sumberdaya atau tenaga pelaksana yang tersedia. Hal ini disebabkan jumlah personil kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Kampar bagian Unit Dikyasa sebagai pelaksana program memiliki jumlah yang sedikit yaitu sebanyak 2 atau 3 personil. Sehingga tidak sebanding dengan jumlah kelompok sasaran program dalam hal ini adalah pelajar yang mengikuti program safety riding. Hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan program safety riding karena mengingat sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian yang memiliki tanggapan sebagai berikut :

“Memang selama pelaksanaan program safety riding dilaksanakan yang menjadi kendala kami adalah yaitu jumlah personil yang bertugas masih sedikit yaitu 2 atau 3 personil yang bertugas. Sehingga dalam pelaksanaan program safety riding kami kewalahan dengan jumlah pelajar yang mengikuti tidak sebanding dengan jumlah personil atau pihak yang bertugas, sehingga kami terkadang kewalahan dalam mengatur pelajar yang mengikuti program safety riding. Jika kekurangan personil maka dari unit lak lintas dan regidentlah yang membantu apabila jika mereka sedang tidak bertugas”. (wawancara dengan kepala bagian Unit Dikyasa satlantas Polres Kampar, 20 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa salah satu hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program safety riding untuk kalangan pelajar oleh Polres Kampar terkendala pada

implementor atau pelaksana kebijakan yaitu satuan lalu lintas polres Kampar yang memiliki jumlah personil yang kurang memadai yaitu berjumlah 2 atau 3 orang. Sehingga implementasi program safety riding untuk kalangan pelajar kurang berjalan efektif karena kekurangan sumberdaya.

2. Kurangnya penyampaian informasi

Informasi merupakan penyampaian pesan baik dari suatu individu ke individu maupun dari suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Informasi merupakan indikator yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Informasi yang berkaitan dengan bagaimana cara pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini peneliti melihat penyampaian informasi secara langsung kepada pelajar berjalan dengan lancar namun, akan berjalan dengan lancar jika berkerjasama atau melibatkan media massa dalam penyampaian informasi secara tidak langsung.

Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan informan penelitian sebagai berikut :

“pelaksanaan program safety riding berjalan dengan lancar apabila jika pihak Satuan Lalu Lintas bekerja sama atau berkoordinasi dengan pemerintah dan media massa dalam penyampaian informasi secara tidak langsung”(wawancara dengan **Bapak Togas Manurung, 15 Desember 2017**)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa penyampaian informasi program safety riding akan lebih baik jika diiringi dengan penyampaian atau sosialisasi secara tidak langsung yaitu dengan bekerja sama atau berkoordinasi baik melalui pemerintah dan media massa. Koordinasi antara Pihak Satuan Lalu Lintas dengan

pemerintah yang dimaksud dapat berupa penyampaian informasi atau pesan seperti melalui kerja sama dengan pemerintah melalui penanyangan bagaimana cara berkendara dengan aman dan cermat serta video akibat dari kecelakaan lalu lintas, serta bekerja sama dengan media massa seperti radio dalam menyampaikan atau menghibau kepada seluruh masyarakat maupun pelajar agar memperhatikan berkendara yang aman sehingga tidak merugikan banyak orang.

3. Rendahnya kesadaran pelajar

Suatu kebijakan dapat di implementasikan jika terdapat unsur-unsur yaitu adanya tujuan, program, dana, adanya aktor atau pelaksana kebijakan, pihak swasta, serta masyarakat. Suatu kebijakan akan berhasil apabila diimplementasikan oleh pelaksana kebijakan atau implementor yang sesuai dan mengerti dibidang tersebut serta memiliki keahlian dan kecakapan dibidangnya dan didukung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri. Walaupun implementasi dari sebuah kebijakan telah dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan yang memiliki kecakapan dan keahlian dibidangnya, namun jika kesadaran masyarakat yang kurang untuk mematuhi sebuah peraturan atau kebijakan maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Begitu juga dalam pelaksanaan program safety riding pada kalangan pelajar, peneliti menemukan masih ada beberapa pelajar yang masih tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan penelitian yaitu sebagai berikut :

“setelah dilaksanakan program safety riding khususnya pada kalangan pelajar, memang beberapa siswa atau pelajar ada yang mulai tertib dalam berlalu lintas di jalan raya seperti

menggunakan helm, perlengkapan kaca spion dua buah masing-masing kendaraan dan lainnya. Namun masih juga terdapat beberapa pelajar yang masih tidak menerapkan aturan dalam berkendara, karena menganggap keselamatan dalam berkendara bukanlah suatu kebutuhan. Karena sudah menjadi budaya atau kebiasaan dalam melanggar aturan dalam berlalu lintas “(wawancara dengan kepala bagian Unit Dikyasa satlantas Polres Kampar, 20 Oktober 2017).

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan informan penelitian Bapak Djunaidi M.Pd :

“Semenjak diadakannya pelaksanaan program safety riding yang bekerjasama dengan sekolah kita, beberapa pelajar sudah mulai tertib dalam berkendara. Memang dengan adanya program safety riding ini membawa manfaat bagi pelajar. Namun, masih ada juga beberapa pelajar juga yang tidak menerapkan aturan dalam berlalu lintas karena memang semuanya kembali lagi pada individu masing-masing”. (wawancara dengan kepala sekolah SMKN 1 Bangkinang Kota, 23 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berkendara. Pola pikir dari masyarakat/pelajar yang tidak berubah yang masih menganggap keselamatan bukanlah suatu kebutuhan. Budaya atau kebiasaan untuk tidak tertib berlalu lintas sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sulit untuk meyakinkan atau merubah pola pikir masyarakat/ pelajar karena sudah menjadi kebiasaan dan terlebih lagi menyangkut perubahan perilaku masyarakat/pelajar dalam berlalu lintas. Sebuah program yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan dari pada program

yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang peneliti lakukan dapat disimpulkan Implementasi Program Safety Riding Untuk Kalangan Pelajar Oleh Polres Kampar sebagai berikut :

A. Implementasi Program Safety Riding Untuk Kalangan Pelajar Oleh Polres Kampar

Implementasi Program Safety Riding Untuk Kalangan Pelajar Oleh Polres Kampar dari pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program safety riding. Diketahui dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. komunikasi,

Implementasi Program Safety Riding sudah berjalan dengan lancar, karena penyampaian informasi secara jelas dan langsung kepada kelompok sasaran atau pelajar.

2. Sumberdaya

pada Implementasi Program Safety Riding sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala, karena dari segi sumberdaya manusia atau staf dalam pelaksanaan program safety riding masih kurang atau berjumlah sedikit. Dan dari sumberdaya fisik berupa fasilitas dalam pelaksanaan safety riding juga masih kurang.

3. Disposisi

Dalam Implementasi Program Safety Riding, program safety riding sudah berjalan dengan lancar, hal ini diketahui dari pelaksana program safety riding yaitu Satuan Lalu Lintas Polres mendukung sepenuhnya dan siap melaksanakannya.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi Program safety riding sudah berjalan dengan baik, namun hanya saja pada indikator SOP masih belum ada secara khusus yang mengatram safety riding, keterlibatan masyarakat sudah menyeluruh dalam memanfaatkan hasil dari program yang dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini lebih banyak dibandingkan tahap - tahap sebelumnya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Safety Riding Untuk Kalangan Pelajar Oleh Polres Kampar

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan dilapangan adapun Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Safety Riding Oleh Polres Kampar yaitu : dari tenaga pelaksana sumberdaya manusia dalam hal ini adalah satuan lalu lintas polres Kampar yang berjumlah sedikit dan dari sumberdaya fisik berupa fasilitas atau alat-alat yang disediakan masih kurang dalam Implementasi Program Safety Riding dan masih kurangnya penyampaian informasi . Selain itu juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat/pelajar itu sendiri. Masih rendahnya kesadaran masyarakat/pelajar untuk tertib dalam berlalu lintas karena sudah menjadi budaya atau kebiasaan dalam melanggar aturan berlalu lintas.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai Implementasi Program safety Riding Untuk Kalangan Plejar Oleh Polres Kampar, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan program safety riding sebaiknya dibuat *Standar Operating Procedure (SOP)* khusus agar pelaksanaan program safety

riding dapat berjalan dengan terencana dengan baik.

2. Untuk meningkatkan pelaksanaan program safety riding kedepannya, upaya yang perlu dipertimbangkan oleh satuan lalu lintas polres Kampar yaitu dengan menambah personel dari unit dikyasa sebagai pelaksana program safety riding agar pelaksanaan program safety riding berjalan dengan lancar apabila jumlah pelaksanaannya lebih banyak.
3. Untuk mendukung pelaksanaan program safety riding sebaiknya pihak satuan lalu lintas polres Kampar bekerja sama atau berkoordinasi dengan pemerintah maupun media massa untuk menyampaikan informasi program safety riding kepada publik yaitu secara tidak langsung melalui kerjasama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah
- Adisasmitha, Rahardjo dan Adisasmitha, Sakti Adji. 2011. *Manajemen Transportasi Darat*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Agustino. Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gaava Media : Yogyakarta
- Keban, Yoremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Konsep Teori Dan Isu (Edisi Ke-2)*. Gravamedia : Yogyakarta
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Ga-Va Media

- Maleong, Lexy. J, 2004. *Metodologi Pemilihan Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan)*. Bandung : Alfabeta
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodelegi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy; Analisis Srtategi Advokasi Teori dan Praktek*. PNM : Surabaya
- Nugroho, Riant. 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- _____ 2012. *Public Policy*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- _____ 2014. *Public Policy*. Edisi Kelima *Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Pasolong, Herhani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Persons, Wayne. 2011. *Publik Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta. Kencana.
- Subarsono, 2005. *Analisa Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Praktik (Studi Implementasi Pembangunan Perkebunan Daerah Transmigrasi Riau)*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI: Bandung
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Centre Of Academic Publishing Service (CAPS).
- Karya Ilmiah :**
- Wahyu, Dine. Skripsi. 2015 : Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Perilaku Safety Riding Pada Mahasiswa Fakultas X Universitas Dipenogoro
- Internet :**
- <http://topriau.com/jaga-riau/news/5208-antisipasi-kecelakaan-satlantas-polres-kampar-safety-riding-kepada-para-pelajar-di-bangkinang-kota.html>
- www.wikipedia.com
- <http://kamparkab.go.id/home/page/luas-wilayah-kecamatan>
- Dokumentasi :**
- Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Agkutan Jalan
- Perturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor